



FHUP Press



# UUD 1945

## DAN PERUBAHANNYA DALAM SATU DOKUMEN

DENGAN TEKNIK AMANDEMEN

DR. MOCHAMAD ISNAENI RAMDHAN, S.H., M.H.

**UUD 1945  
DAN PERUBAHANNYA  
DALAM SATU DOKUMEN  
DENGAN TEKNIK AMANDEMEN**

MOCHAMAD ISNAENI RAMDHAN



FHUP Press

... a constitution is after all, a fundamental law, which we therefore expect  
-and want-to be more permanent then the ever-changing,...

- Lynd Barker -



## Pamonggar Kata

Sebagaimana diketahui Sejak Tahun 2002 MPR menetapkan landasan baru bagi pengembangan demokrasi dan hukum di Indonesia antara lain melalui Perubahan UUD 1945. Dalam Perubahan UUD 1945 tersebut diatur penataan baru terhadap suprastuktur ketatanegaraan, antara lain: membatasi kekuasaan Presiden; dan menambah kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); menghapus keberadaan lembaga-negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA); –dan digantikan dengan dewan pertimbangan di bawah kekuasaan Presiden- menambah lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta MahkamahKonstitusi (MK) –di samping itu terdapat lembaga-lembaga penunjang seperti Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial- serta mengurangi tugas dan wewenang MPR akibat pengalihan kekuasaan pelaksana kedaulatan rakyat dari MPR kepada rakyat melalui Undang-Undang Dasar.

Beranjak dari hasil Sidang Tahunan MPR 2002 tersebut, buku ini diterbitkan dan untuk dapat dipertimbangkan sebagai pedoman bagi perkuliahan –khususnya pada mata kuliah Hukum Tata Negara; Teori dan Hukum Konstitusi, serta mata kuliah Politik Hukum- yang relevan dengan perkembangan hukum tata negara mutakhir maupun pedoman bagi para calon anggota lembaga perwakilan rakyat 2014.

Setidaknya ada dua urgensi buku ini layak dipelajari, antara lain:

- (1) Buku-buku referensi yang selama ini dijadikan pedoman perkuliahan masih menggunakan buku dengan nuansa ketatanegaraan yang terjadi sebelum Perubahan UUD 1945, sehingga dibutuhkan buku baru yang relevan dengan Perubahan UUD 1945 yang dapat dikonsumsi para peserta maupun pengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Politik Hukum baik pada Strata satu maupun mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi pada Strata Dua;
- (2) Makin dibutuhkannya sebuah karya ilmiah yang mengkaji UUD 1945 dan Perubahannya dalam satu dokumen, sehingga dapat dijadikan acuan komparatif terhadap dua undang-undang dasar. Yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para anggota MPR sebagai kajian komprehensif terhadap Perubahan UUD 1945.

Buku ini diberi judul UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERUBAHANNYA DALAM SATU DOKUMEN dengan teknik amandemen dengan pertimbangan, bahwa: Pertama pada realitasnya telah terjadi perumusan konstitusi baru yang menggantikan UUD 1945. Meskipun pada awalnya, BP MPR sepakat menggunakan pendekatan amandemen baik prosedur maupun teknik Perubahan UUD 1945, namun kesepakatan tersebut telah ditanggalkan oleh para perumus Perubahan UUD 1945.

Bahkan dalam Perubahan UUD 1945 dirumuskan seratus tujuh puluh satu diktum baru, sehingga lebih tepat jika perubahan UUD 1945 dinyatakan sebagai UUD baru. Kedua, teknik amandemen diajukan demi tercermatinya penggantian diktum lama dengan diktum yang baru sekaligus memahami diktum yang lama yang secara komprehensif; Kedua, sampai karya ini dibuat belum terdapat dokumen yang secara utuh dan sistematis memuat UUD 1945 beserta Perubahannya. Buku yang dipublikasikan oleh beberapa penerbit hanya memuat Perubahan UUD 1945, –tanpa mencantumkan diktum yang lama- sehingga adanya naskah yang memuat perbandingan diktum lama dengan diktum baru dalam UUD 1945 semakin dibutuhkan.

Selanjutnya dalam buku ini kelak dapat dipelajari alasan-alasan pengubahan UUD 1945; kronologi pengubahan UUD 1945, Perbandingan Suprastruktur Ketatanegaraan sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945, serta pilihan paradigme bagi Komisi Konstitusi. Dalam pada itu, buku ini disertai dengan lampiran berupa rancangan perubahan UUD 1945 yang diajukan oleh BP-MPR sehingga pembaca dapat lebih komprehensif mengetahui perubahan pasal yang dirancang serta perubahan akhirnya.

Kritik dan rekomendasi korektif bagi penyempurnaan buku ini, senantiasa penulis sambut dengan terbuka. Kepada segenap pihak yang membantu terbitnya buku ini, khususnya pihak penerbit, tidak lupa penulis haturkan terimakasih.

Bekasi, April 2014

Penulis

Mochamad Isnaeni Ramdhan



## DAFTAR ISI

<b>PAMUNGGAR KATA</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>	1
A. Kesepakatan MPR dalam Perubahan UUD 1945	1
B. Konsekuensi Perubahan UUD 1945 bagi Disiplin Ilmu HTN	4
C. Perubahan UUD 1945: Politik Hukum Tata Negara di Indonesia	6
<b>BAB 2    PENGUBAHAN UUD 1945</b>	11
A. Pengertian dan Klasifikasi Perubahan UUD 1945	11
B. Alasan Perubahan UUD 1945	19
C. Kronologi Perubahan UUD 1945 (1999-2002)	28
<b>BAB 3    STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	59
A. Pengertian Struktur Ketatanegaraan	59
B. Suprastruktur Ketatanegaraan Menurut UUD 1945	60
C. Suprastruktur Ketatanegaraan Menurut Perubahan UUD 1945	62
<b>BAB 4    PERIHAL KOMISI KONSTITUSI DAN KONSTITUSI TRANSITIF</b>	78
A. Kontroversi Komisi Konstitusi	78
B. Pilihan Paradigma bagi Komisi Konstitusi	80
C. Perubahan UUD 1945 (Konstitusi Definitif atau Transitif)	84
D. Korelasi Cara Perubahan Dengan Derajat Konstitusi	95
E. Derajat UUD 1945 Beserta Perubahan-perubahannya	96
<b>BAB 5    UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA DALAM SATU DOKUMEN</b>	98

DAFTAR PUSTAKA		142
LAMPIRAN 1	Piagam Jakarta (22 Juni 1945)	143
LAMPIRAN 2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tahun 1959 tentang Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)	144
LAMPIRAN 3	Rancangan-rancangan Perubahan UUD 1945	168
LAMPIRAN 4	Laporan PAH I pada Rapat Ke 4 BP MPR (25 Juli 2002)	195
LAMPIRAN 5	Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi (11 Agustus 2002)	208
LAMPIRAN 6	Konstitusi Republik Indonesia Serikat	212
LAMPIRAN 7	Undang-Undang Dasar Sementara 1950	265
BIODATA PENULIS		300